

Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember

(Influence Regional Financial Transparency And Accountability About Government Performance In Jember Regency)

Rido Agung Gigih Krisherdian
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Krisherdian@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi transparansi dan akuntabilitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah tentang keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember. Penilaian persepsi didasarkan pada indikator-indikator yang mencerminkan kondisi yang transparan dan akuntabel. Sampel penelitian diambil dari keseluruhan populasi dengan pertimbangan jumlah populasi yang relatif sedikit (kurang dari 100) maka seluruh elemen populasi dapat diambil secara keseluruhan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui hasil rekapitulasi dari jawaban kuesioner yang telah diberikan kepada responden. Alur analisis dimulai dari Uji kualitas data dan berlanjut ke uji asumsi klasik dan terakhir pada uji hipotesis. Hasil pengujian hipotesis dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik transparansi maupun akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, kinerja pemerintah daerah

Abstract

This study aimed to examine the effect of members of local legislative perception about local financial transparency and accountability toward local government performance. Perception assessment base on indicators that reflect transparent and accountable condition. Sample were taken from the overall population with consideration of the pupolation is relatively small (less than 100) then all elements can be taken as a whole population. This study uses primary data obtained the recapitulation of the questionnaire that has been given to the respondent. Analysis flow starts from quality data test and continues to classical assumption test and for the last is a hypothesis testing. The result of testing hypothesis of this study showed that both transparency and accountability affect the performance of local government performance.

Keywords: transparency, accountability, government performance

Pendahuluan

Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). Pada tahun 2004, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami

beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim & Kusufi: 2013:1).

Saat ini otonomi daerah mendorong semua pemerintahan daerah di Indonesia untuk berbondong-bondong membangun daerahnya masing-masing. Tidak terkecuali kabupaten Jember. Semua program pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jember semata-mata dilakukan untuk membangun daerah kabupaten Jember sebagai bentuk otonomi daerah yang diberlakukan di negara Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan itu sendiri maka disusunlah anggaran pendapatan dan belanja daerah di setiap tahunnya guna merealisasikan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Jember adalah daerah di Jawa Timur yang dipimpin oleh kepala daerah yang sama selama dua periode berturut-turut yang dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2005 – 11 Agustus 2010 kemudian berlanjut mulai 25 September 2010 hingga saat ini. Terpilihnya kepala daerah dua kali berturut-turut ini secara tidak langsung memberi kesan baik dan positif bahwa kinerja pemerintah daerah selama periode jabatan kepala daerah tersebut telah berjalan dengan baik dan memuaskan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Politika Research Center yang menyimpulkan bahwa pencapaian terbaik pemerintah kabupaten Jember di bawah kepemimpinan bupati Ir. H. MZA. Djalal, M.Si adalah di sektor infrastruktur, ekonomi, pertanian dan perkebunan. Namun, hasil survei yang dilakukan juga menyimpulkan bahwa dibawah kepemimpinan beliau, terdapat 3 (tiga) sektor pencapaian yang kurang optimal, yakni pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sektor publik. Secara garis besar survei ini menyimpulkan bahwa kinerja pemerintahan selama satu periode dipersepsikan kurang memuaskan yang bahkan berlanjut hingga ke periode berikutnya. Tentunya penilaian kinerja ini sangat bertolak belakang dengan kesan yang tersirat atas terpilihnya kepala daerah selama 2 (dua) periode secara berturut-turut terlebih dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selama 3 tahun ini mengalami peningkatan secara signifikan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Jember dalam 3 (tiga) tahun terakhir ini mengalami kenaikan di setiap tahunnya. APBD Kabupaten Jember Tahun 2014 mencapai Rp. 2,666 triliun, naik 12,06% atau Rp. 286,95 miliar dibandingkan APBD 2013 yang hanya Rp. 2,378 triliun. Kenaikan angka tersebut didapatkan karena sejumlah peningkatan, baik dari PAD yang naik hingga 51% dan di sektor belanja juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 93,403 miliar. Sama halnya dengan peningkatan di tahun 2014, pada tahun 2015 ini APBD mengalami kenaikan di angka Rp. 2,9 triliun. Tentunya kenaikan kenaikan APBD ini bertolak belakang dengan opini sebagian masyarakat yang menyatakan kurang puas dengan kinerja pemerintah daerah.

Pemerintah Daerah tidak berjalan sendiri dalam mengemban tugasnya untuk mengembangkan daerahnya serta mewujudkan cita-cita bangsa yakni keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah. Peran DPRD sendiri dalam pemerintahan daerah juga sangat penting, dimana DPRD ini menjalankan fungsinya sebagai mitra sekaligus pengawas dari kinerja Pemerintah Daerah. Sebagai contoh peran DPRD dalam pemerintahan yakni seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPRD yakni DPRD bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten. Ini membuktikan bahwa DPRD sejatinya juga memiliki fungsi pengawasan dalam penetapan keputusan dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Maka dari itu sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala program atau kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah kabupaten Jember, serta terwujudnya kinerja yang maksimal dan memuaskan bagi masyarakat selaku penikmat jasa, maka diperlukan pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam melakukan segala kegiatannya agar masyarakat secara langsung bisa mengawasi jalannya pembangunan itu sendiri. Selain dari keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemahaman anggota legislatif tentang prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus ditingkatkan agar DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah menjalankan fungsinya dengan baik salah satunya adalah menjadi pengawas terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Lismawati (2013), menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SKPD Provinsi Bengkulu, demikian pula dengan hasil penelitian Meidawati (2012) juga menyimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di kabupaten Situbondo. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan pengelolaan keuangan dan pelaporan keuangan maka akan semakin meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.

Meidawati (2012), menyatakan bahwa akuntabilitas Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah, hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap kinerja satuan kerja Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rohmah (2003). Hasil dari penelitian terdahulu membuktikan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan daerah diperlukan guna mewujudkan suatu kondisi yang akuntabel dalam pemerintahan daerah. Sehingga dengan terciptanya kondisi yang akuntabel, memudahkan pengawasan atas kinerja pemerintah itu sendiri dan dengan pengawasan yang baik akan menjadi pemicu kinerja pemerintahan yang semakin baik pula.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintahan dari sudut pandang eksekutif yakni Pemerintah Daerah sebagai pelaksana operasional kegiatan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis pemahaman tentang transparansi dan akuntabilitas dari sudut pandang legislatif yakni anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Jember yang menurut Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah, pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Indriantoro dan Supomo (2012:147), data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan data primer yang digunakan dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember.

Populasi yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan tidak menarik sampel dikarenakan Peneliti tidak perlu menggunakan sampel jika elemen populasi terlalu heterogen ataupun jumlah populasinya relatif sedikit (kurang dari 100) karena perhitungan sampel dengan jumlah populasi yang kurang dari 100 akan menghasilkan jumlah sampel yang sangat sedikit (Sarjono, 2013:22).

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel yaitu: 1) Variabel independen: Transparansi (X_1), Akuntabilitas (X_2), 2) Variabel dependen: Kinerja Pemerintah Daerah (Y). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan metode metode analisis regresi linier berganda, kemudian dilakukan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis dengan transparansi dan akuntabilitas sebagai variabel bebas, dan kinerja pemerintah daerah sebagai variabel terikatnya.

Hasil Penelitian

Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro dan Supomo, 2012:115). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember yang beranggotakan 45 orang yang berada di komisi A, B, C dan D. Sampel adalah bagian dari populasi yang dipercaya dapat mewakili karakteristik populasi secara keseluruhan. Peneliti tidak perlu menggunakan sampel jika elemen populasi terlalu heterogen ataupun jumlah populasinya relatif sedikit (kurang dari 100) karena perhitungan sampel dengan jumlah populasi yang kurang dari 100 akan menghasilkan jumlah sampel yang sangat sedikit. Hal ini akan membuat hasil penelitian menjadi kurang akurat, jika jumlah populasi penelitian kurang dari 100, sebaiknya seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel (Sarjono, 2013:22). Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan alamat Jalan Kalimantan No. 86 kecamatan Sumpalsari kabupaten Jember.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik dari variabel penelitian. Statistik

deskriptif memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi frekuensi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diuji dalam penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2012).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli (Indriantoro dan Supomo, 2012:147). Dalam mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data secara langsung sehingga teknik pengumpulan data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini atau sumber data adalah dengan melakukan penyebaran kuisisioner kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Jember.

Tabel 1. Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Transparansi (X_1)	3,67	4,67	4,21	0,28
Akuntabilitas (X_2)	3,67	4,67	4,16	0,29
Kinerja Pemerintah (Y)	4	4,67	4,22	0,23

Sumber: Data diolah, Februari 2015

Berdasarkan Tabel 1. yang dipaparkan, diperoleh penjelasan yang berkaitan dengan variabel Transparansi (X_1) dimana variabel ini mempunyai nilai skor minimum sebesar 3,67, skor maksimum sebesar 4,67. Nilai standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,28. Nilai rata-ratanya sebesar 4,21, dimana lebih tinggi dari pada nilai minimum yang ditentukan yaitu 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang luas terhadap prinsip transparansi baik secara teoritis maupun praktis. Variabel Akuntabilitas (X_2) dimana variabel ini mempunyai nilai skor minimum sebesar 3,67, skor maksimum sebesar 4,67. Nilai standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,29. Nilai rata-ratanya sebesar 4,158, dimana lebih tinggi dari pada nilai minimum yang ditentukan yaitu 3,67. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi mengenai akuntabilitas keuangan daerah kabupaten Jember. Variabel Kinerja Pemerintah (Y) mempunyai skor minimum sebesar 4, skor maksimum sebesar 4,67. Nilai standar deviasi yang dimiliki sebesar 0,23. Nilai rata-ratanya sebesar 4,217, dimana lebih tinggi dari pada nilai minimum yang ditentukan yaitu 4. Hal ini menunjukkan bahwa responden mengerti tentang kinerja pemerintah kabupaten Jember.

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas adalah lanjutan dari uji validitas dimana hanya item-item yang valid saja yang diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode *Cronbach Alpha* dengan bantuan *software* SPSS. Instrumen dapat dikatakan reliabel jika nilai *alpha* lebih besar dari 0,60.

Tabel 2. Uji Realibilitas

No.	Variabel	Nilai	α Ketetapan	Keterangan
		<i>Cronbach Alpha (α)</i>		
1	Transparansi(X ₁)	0,724	0,600	Reliabel
2	Akuntabilitas (X ₂)	0,783	0,600	Reliabel
3	Kinerka Pemerintah (X ₃)	0,826	0,600	Reliabel

Sumber: Data diolah, Februari 2015

Berdasarkan syarat uji reliabel maka telah terlihat bahwa data telah reliabel karena signifikansinya telah memenuhi syarat *Cronbach alpha* > r_{tabel} pada nilai signifikasi 6%.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendapatkan nilai yang *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE), diantaranya adalah dengan uji normalitas data, heterokedastisitas dan multikolinearitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5% (Prayitno, 2010:71).

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Status pada $\alpha = 0.05$
Transparansi (X1)	0,162	Berdistribusi Normal
Akuntabilitas (X2)	0,124	Berdistribusi Normal
Kinerja Pemerintah (Y)	0,197	Berdistribusi Normal

Sumber: Data diolah, Februari 2015

Pada Tabel 3. menunjukkan hasil bahwa sebagai pengujian normalitas nilainya menunjukkan hasil untuk masing-masing variabel adalah 0,162, 0,124, 0,197. Sehingga dapat dinyatakan bahwa dengan menggunakan *level of significance* $\alpha = 0,05$, data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Asumsi multikolinearitas adalah keadaan dimana terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel independen dalam model. Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear dalam variabel independen dalam model. Ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) Latan (2013:61), menyatakan bahwa indikasi multikolinearitas pada umumnya terjadi jika VIF lebih dari 10, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya.

Tabel 4. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	<i>Cutt Off</i>	Keterangan
Transpara	1,178	10	Tidak terjadi multikolinearitas

nsi (X ₁)			
Akuntabil	1,178	10	Tidak terjadi multikolinearitas
itas (X ₂)			

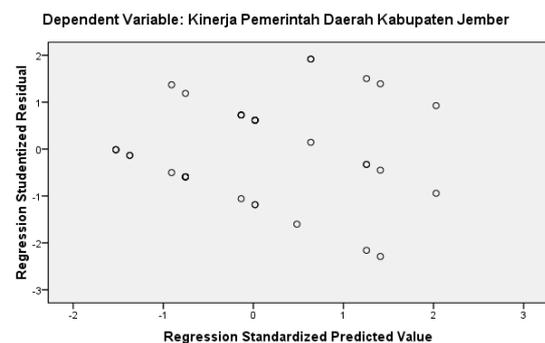
Sumber: Data diolah, Februari 2015

Pada Tabel 5. menunjukkan hasil bahwa nilai *Cutt Off* dan nilai VIF variabel Transparansi (X₁) adalah 10 dan 1,178, Akuntabilitas (X₂) adalah 10 dan 1,178, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas, karena nilai *Cutt Off* > 0,1 (10%) dan nilai VIF < 10 pada masing-masing variabel, artinya tidak terjadi hubungan linier antara variabel yang digunakan dalam model regresi.

3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heterokedastisitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *sacatterplot* model tersebut (Latan, 2013:39).

Gambar 1. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Diolah, Februari 2015

Pada Gambar 1. menunjukkan hasil bahwa tidak adanya heteroskeastisitas, karena tebaran data tidak membentuk garis tertentu atau tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y.

Pembahasan

Bertempat di Jalan Kalimantan No. 86, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember ini melaksanakan tugasnya. Dengan mengusung Visi “Terwujudnya kinerja yang profesional untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pokok DPRD Kabupaten Jember” dimana fungsi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Sekretariat DPRD Kabupaten Jember menjadi lembaga yang profesional dalam memfasilitasi kegiatan DPRD kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Serta dengan mengusung Misi “Meningkatkan profesionalisme aparatur yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai; dan memberikan dukungan administrasi dan keuangan yang dibutuhkan oleh DPRD

Kabupaten Jember sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dengan maksud agar SDM sekretariat DPRD Kabupaten Jember dapat melaksanakan secara optimal dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Jember.

DPRD Kabupaten Jember beranggotakan 45 orang yang terbagi ke dalam 4 komisi dan dari tiap-tiap komisi juga adalah bagian dari badan-badan yang terbentuk di dalamnya. Dari 45 anggota tersebut terbagi ke dalam komisi A, B, C dan D. Sedangkan dari masing-masing komisi juga adalah bagian dari Badan Musyawarah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan legislasi Daerah.

Dari 45 anggota yang ada didalamnya, para anggota berada dalam 8 fraksi yang mengusung para anggota menduduki jabatan sebagai wakil rakyat tersebut. Diantaranya adalah Fraksi Nasional Demokrat, Fraksi Harkat (Hanura-Demokrat), Fraksi partai Golkar, Fraksi partai Gerindra, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Amanat Pembangunan (PAN-PPP)

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja

Transparansi berpengaruh terhadap kinerja. Hasil uji T untuk hipotesis pertama menunjukkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel transparansi (X_1) memiliki nilai t 2,188 > 2,026 dan signifikansi $0,035 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel transparansi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah kabupaten Jember.

Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa hak publik untuk mendapat pengumuman oleh pemerintah terkait kebijakan publik sudah diikuti oleh efektifitas media yang digunakan. Pemberian informasi kepada publik yang dirasa telah dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, telah menjadikan kinerja pemerintah atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikontrol dan diketahui oleh publik karena kemudahan dalam mendapatkan informasi merupakan bentuk transparansi atau keterbukaan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lismawati (2013), dimana dalam penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa peneraan transparansi menunjukkan hasil yang berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Rohmah (2012), menyatakan bahwa upaya partai politik dalam menerapkan transparansi tentang pelaporan laporan keuangan berpengaruh positif signifikan dengan arah positif terhadap kinerja partai politik.

Pengaruh Asimetri Informasi terhadap Senjangan Anggaran

Hasil uji t untuk hipotesis kedua menunjukkan bahwa H_2 diterima dan H_0 ditolak, ini ditunjukkan oleh variabel akuntabilitas (X_2) memiliki nilai t 2,860 > 2,0126 dan signifikansi $0,007 < 0,05$, yang berarti secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. Hasil tersebut

menunjukkan t_{hitung} positif, maka jika ada peningkatan pada variabel akuntabilitas maka akan terjadi peningkatan pula terhadap kinerja pemerintah.

Akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja diukur dari ada jaminan kepatuhan hukum dan tidak ada penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Jember. Dengan artian lainnya bahwa adanya akuntabilitas hukum dan kejujuran yang meliputi adanya kesesuaian jaminan kepatuhan hukum terhadap hukum dan peraturan yang diisyaratkan dalam peraturan daerah terkait penggunaan sumber dana publik, dan tidak adanya penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) selama periode pemerintahan kabupaten, telah menjadikan kinerja pemerintah daerah semakin efektif karena ada kesadaran pribadi dari tiap-tiap individu dalam mengemban amanah yang sudah diberikan kepadanya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meidawati (2012) dimana pada penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan dengan arah positif terhadap kinerja satuan kerja pemerintah daerah di kabupaten Situbondo.

Hasil penelitian ini konsisten dengan Hartanti (2011) yang menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa akuntabilitas keuangan juga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Kesimpulan dan Keterbatasan

Kesimpulan

Hasil penelitian menggunakan model regresi menyatakan bahwa secara statistik signifikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Dengan demikian Hipotesis 1 diterima dengan simpulan Transparansi laporan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif

Hasil penelitian menggunakan model regresi menyatakan bahwa secara statistik signifikan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara asimetri informasi dengan senjangan anggaran. Dengan demikian Hipotesis 2 diterima dengan simpulan Akuntabilitas keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Jember dengan arah positif.

Keterbatasan

Penelitian hanya dikhususkan kepada beberapa poin dalam menilai kinerja pemerintah daerah yakni transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan masih banyak unsur lain yang dipakai dalam pengukuran kinerja baik dalam lingkup internal maupun eksternal. Peneliti dalam penelitian lain yang sejenis dapat menambahkan unsur lain yang lebih kompleks baik dalam lingkup internal maupun eksternal dalam penelitiannya seperti indikator-indikator ekonomi dan sosial secara komprehensif yang mencakup diantaranya keadaan ekonomi nasional, lingkungan bisnis, stabilitas dan pengembangan, kesehatan dan pendidikan;

Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data, maka dibutuhkan kejujuran responden dalam menjawab poin-poin pertanyaan kuesioner tersebut. Apabila kemungkinan ada responden yang tidak menjawab dengan serius atau tidak jujur atau karena faktor kesibukan pekerjaan maka hal tersebut diluar kendali peneliti.

Daftar Pustaka

- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2013. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Hartanti, Karina. 2011. *Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, N., dan Supomo, B. 2012. *Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Latan, Hengky. 2013. *Analisis Multivariat Teknik dan Aplikasi*. Bandung : Alfabeta.
- Lismawati, Husaini dan Lucy Aitya. 2013. *Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*. Jurnal Fairness Volume 3, Nomor 1, 2013 : 21-41
- Meidawati, Nurida. 2012. *Analisis Pengaruh Persepsi Penerapan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember. Jember
- Prayitno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Data Statistik SPSS*. MediaKom, Yogyakarta.
- Rohmah, Lailatur. 2012. *Persepsi Mahasiswa Akuntansi Unesa Tentang Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Partai Politik Terhadap Kinerja Partai dan Upaya Pemberantasan Kejahatan Kerah Putih*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya. Surabaya.
- Sarjono, Haryadi dan Winda Julianita. 2013. *SPSS vs LISREL : Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta : Salemba Empat.

